

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana ZIS Terhadap Kemiskinan: Bukti Empiris Data Panel di Aceh

Istafan Najmi¹

Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama, Aceh Besar

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) terhadap kemiskinan pada 23 kabupaten/ kota di provinsi Aceh selama 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2013-2017. Metode yang digunakan adalah dengan analisis regresi data panel. Hasil uji hausman (hausman test) menunjukkan bahwa model terbaik untuk data panel ini adalah random effect model. Studi ini menyimpulkan bahwa variabel independen secara simultan signifikan terhadap Kemiskinan. Secara parsial PAD signifikan negatif terhadap kemiskinan di kabupaten/ kota di provinsi Aceh. Dan dana ZIS signifikan negatif terhadap kemiskinan, artinya pendapatan asli daerah dan dana zakat infaq dan sadaqah dapat menurunkan kemiskinan di kabupaten/ kota di provinsi Aceh. Dari temuan ini dapat dimaknai bahwa kemampuan variabel independen dapat menjelaskan sebesar, 95.59 % terhadap kemiskinan. Dan sisanya sebesar 4.41% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Pemerintah kabupaten/ kota diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan dana zakat infaq dan sadaqah, sehingga akan terus memberikan kontribusi dalam menurunkan kemiskinan.

Kata kunci: Kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah, Dana ZIS, Regresi Panel.

Abstract. This study aims to determine the effect of Regional Original Income (PAD), Zakat Infaq and Sadaqah funds (ZIS) on Poverty (MIS) in 23 districts/cities in Aceh province for 5 (five) years, namely 2013-2017. The method used is panel data regression analysis. The Hausman test results (Hausman test) show that the best model for this panel data is a random effect model. This study concludes that the independent variables are simultaneously significant towards poverty. Partially the PAD is significantly negative for the consequences in districts/ cities in Aceh province. And ZIS funds are significantly negative towards poverty, meaning that local revenue and zakat infaq and sadaqah funds can reduce poverty in districts / cities in Aceh province. From these findings, it can be interpreted that the ability of independent variables can explain, 95.59% of poverty. And the remaining 4.41% is explained by other variables not included in this study. The district/ city government is expected to be able to increase regional original income and infaq and sadaqah zakat funds so that it will continue to contribute to reducing poverty.

Keywords: Poverty, Regional Original Income, Zakat Infaq & Sadaqah, Panel Regression.

*Corresponding author. Email: istafannajmi@abulyatama.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v3i1.92>

Received: 19 April 2019, Revision: 19 Juni 2019, Accepted: 25 Juni 2019

Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204.

Copyright © 2019. Published by Divisi Riset, Lembaga KITA.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang dialami oleh negara yang berkembang, dan bagi negara maju yang telah memiliki kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang memadai (Astrini, 2013). Dengan demikian dapat dimaknai bahwa kemiskinan yang terus terjadi harus dilakukan usaha-usaha di dalam mengurangnya. Pengurangan kemiskinan merupakan salah satu yang utama tantangan di antara kabupaten dan kota di Indonesia (Miranti et al., 2013). Apalagi kemiskinan yang dialami oleh penduduk suatu daerah selalu berdampak pada ketimpangan pendapatan di daerah tersebut (Amri, 2017a). Semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar ketimpangan pendapatan (Amri & Nazamuddin, 2018a).

World Bank (2010) menjelaskan bahwa kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Ini termasuk berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya sarana dan kapasitas memadai, serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik.

Selama periode tahun 2013 sampai dengan 2017 jumlah dan persentase penduduk miskin di Aceh berfluktuasi. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin mencapai 17,06 persen, selanjutnya terjadi peningkatan sebesar 17,08 persen pada akhir 2015. Dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 16,73 persen dan terus terjadi penurunan hingga akhir tahun 2017 sebesar 15,92 persen. Persentase penduduk miskin hingga periode tahun 2017 terus mengalami penurunan, hal ini membuktikan bahwa kehidupan masyarakat pada kabupaten/ kota terus membaik.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini

menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Dana Alokasi Umum (DAU) pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32/2004).

Pada tahun 2013 realisasi PAD kabupaten/kota sebesar 4.15 milyar dan terjadi peningkatan pada tahun 2015 sebesar 4.28 milyar dan pada akhir tahun 2017 terjadi sedikit penurunan sebesar 4.14 milyar. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan perbaikan fasilitas umum. PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, sehingga sehingga tidak selalu tergantung kepada pemerintah yang lebih tinggi (Amri et al., 2019).

Potensi perekonomian antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan pemerintah daerah (*fiscal capacity*), seperti dari hasil industri dan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan PDRB. PAD, DAU, dan DAK merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah (Sejahtera, 2016). Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Maryati dan Endrawati, 2010).

Menurut Darise (2006) PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sumber-sumber PAD diantaranya terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah (Amri et al., 2019).

Ketika PAD meningkat, maka kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah juga akan meningkat termasuk kemampuan untuk penyediaan barang-barang modal bagi perekonomian (Amri, 2017b). Pada gilirannya belanja modal tidak hanya berdampak pada pembentukan modal pemerintah daerah, tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan (Amri & Aimon, 2017).

Realisasi dana ZIS kabupaten kota di Aceh cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan tingkat kemiskinan (Amri & Marwiyati, 2019). Bashir (2018) mengungkapkan bahwa pendekatan Islam untuk mengurangi ketidaksetaraan (pendapatan) dan mengurangi kemiskinan berfokus pada mekanisme yang digunakan secara historis dan berhasil mengurangi ketidaksetaraan, baik mekanisme wajib (zakat) maupun sukarela (sadaqah) digunakan untuk memotivasi orang kaya untuk menghabiskan banyak dana untuk program pengurangan kemiskinan.

Literature Review

Berkaitan dengan penelitian kemiskinan BPS (2018) menjelaskan bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Selanjutnya Abiola dan Mustapha (2015) menemukan bahwa pemerintah federal mengumpulkan pendapatan dan agregat pengeluaran meningkatkan insiden kemiskinan di Nigeria.

Demikian juga World Bank (2010) menjelaskan bahwa kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi lainnya. Seperti rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, akses terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Kemiskinan salah satu dari variabel makro

ekonomi yang mendapat sorotan bagi banyak pemerhati ekonomi disamping variabel lainnya seperti partisipasi angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi (Amri, 2018), ekspor dan kesempatan kerja (Amri & Nazamuddin, 2018b).

Berbagai permasalahan kemiskinan dengan adanya desentralisasi fiskal, Agyemang (2018) menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki potensi untuk pengentasan kemiskinan ketika dicirikan oleh otonomi keuangan yang lebih besar dari unit-unit lokal dengan alokasi anggaran yang tepat, penentuan prioritas, akuntabilitas, dan daya tanggap. Kemudian Sriyana (2018) menunjukkan bahwa pemerintah lokal telah berhasil mengelola masalah kemiskinan di antara kabupaten dan kota. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah lokal tepat dalam kebijakan publik mereka dalam proses pembangunan. Untuk lebih efektif dalam pengurangan kemiskinan.

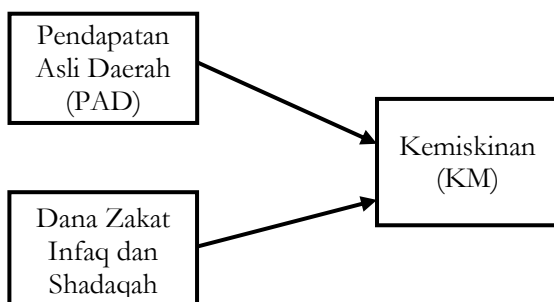
Nursini *et al* (2018) berpendapat bahwa Jumlah dana transfer yang dikelola oleh pemerintah daerah telah meningkat secara signifikan tetapi penurunan penduduk miskin cukup lambat. Pelaksanaan anggaran yang berpihak pada penduduk miskin tergantung pada sejauh mana pemerintah daerah merumuskan perencanaan dan anggaran program yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharajabdinul *at.al* (2015) menguraikan bahwa kapasitas fiskal dan anggaran otonomi yang berfokus pada kemiskinan dalam konteks desentralisasi tetapi tidak dapat menjadi kekuatan pendorong yang potensial di Indonesia meningkatkan kesejahteraan sosial, total transfer pemerintah ke total pendapatan provinsi tidak secara signifikan mempengaruhi kemiskinan di wilayah timur Indonesia

Selanjutnya Ayuniyyah (2018) menunjukkan bahwa, secara umum, program distribusi zakat saat ini dapat dikurangkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan di antara penerima zakat yang diamati. Beik (2015) menemukan bahwa dalam satu tahun bergabung dengan zakat program distribusi, indeks kesejahteraan (falsh) penerima manfaat zakat di Indonesia Jakarta dapat dinaikkan sebesar 96,8 persen, yang diukur dengan indeks CIBEST.

Demikian juga Al- Arif (2009) menjelaskan zakat mampu menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian. Dana zakat dalam bentuk bantuan konsumtif saja mampu memberikan efek pengganda yang signifikan, apalagi zakat yang diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka yang didapat akan lebih besar dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan uraian tinjauan teoritis serta penelitian sebelumnya, bahwasannya dalam mengurangi kemiskinan berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah didalam penelitian ini melihat variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang memiliki pengaruh mengurangi kemiskinan, karena Islam sangat konsisten dalam pengentasan kemiskinan, islam memiliki konsep yang matang dalam membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong di mana mereka yang kaya harus menyisihkan hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan sedekah.

Bila sistem zakat, infaq dan shadaqah berjalan pada porosnya yang benar dan dipastikan akan terus mengalir. Sehingga kemiskinan yang terjadi pada setiap kabupaten/ kota akan terjadi penurunan. Dengan demikian, kerangka pemikiran tersebut menggambarkan hubungan variabel independen yaitu, PAD, dan Dana ZIS terhadap variabel dependen yaitu kemiskinyang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Metodologi Penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber dari Badan Pusat Statistik Aceh dan Badan Pusat Statistik

Kabupaten/Kota dengan time series data periode 2013-2017. Model analisis data yang digunakan adalah regresi panel. Penggunaan model ekonometrik tersebut disebabkan kajian ini menganalisis hubungan kausalitas antar variabel yang datanya berbentuk data panel yakni gabungan antara *time-series data* dan *cross-ception data* (Amri, 2014).

Menurut Green (2012) secara umum regresi panel diformulasikan sebagai berikut.

$$Y_{it} = X'_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

dimana, $i = 1, \dots, n$, dan $t = 1, \dots, t$

Berdasarkan persamaan dasar penelitian ini, maka dapat diformulasikan regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$MIS_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 ZIS_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

MIS : Kemiskinan

PAD : Pendapatan Asli Daerah

ZIS : Zakat Infaq dan Sadaqah

β_0 : Konstanta

β_1 dan β_2 : Koefisien estimasi PAD dan ZIS

e : error term

i : Kabupaten/ Kota

t : Periode Waktu

Menggunakan regresi data panel merupakan sekumpulan teknik untuk memodelkan pengaruh peubah penjelas terhadap peubah respon pada data panel. Secara umum ada dua pendekatan yang digunakan dalam menduga model dari data panel, yaitu model tanpa pengaruh individu (*common effect*) dan model dengan pengaruh individu (*fixed effect* dan *random effect*). Untuk memilih mana diantara tiga pendekatan tersebut yang dinilai paling baik digunakan *Chowt test* dan *Hausman test* (Muliadi & Amri, 2019).

Chowt test dimaksudkan untuk memilih salah satu model pada regresi antara model efek tetap (*fixed effect model*) dengan model koefisien tetap (*common effect model*) dapat dilakukan dengan melakukan *chow test*, dimana hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n$ (efek unit *cross section* keseluruhan tidak berarti)

$H_1 : \alpha_1 \neq 0; i = 1, 2, \dots, n$ (efek wilayah berarti)

Statistik pengujiannya adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{\{RRSS - URSS\}/(n-1)}{URSS/(nT-n-K)}$$

Notasi:

- N : Jumlah individu (*cross section*)
 T : Jumlah Periode waktu (*time series*)
 K : Jumlah variabel endogen
 $RRSS$: *Restricted residual sums of squares* yang berasal dari model koefisien tetap.
 $URSS$: *Unrestricted residual sums of squares* yang berasal dari model tetap

Jika nilai nilai F statistik lebih besar dari F tabel atau $\text{prob} < 0,05$, maka hipotesis awal H_0 ditolak yang berarti model terbaik adalah model efek tetap (*fixed effect model*).

Selanjutnya, Hausman test digunakan untuk memilih model efek acak (*random effect model*). Uji tersebut adalah suatu pengujian untuk mendeteksi ada atau tidaknya hubungan antara galat pada model (galat komposit) dengan satu atau lebih variabel penjelas dalam model. Dimana, hipotesis awalnya adalah tidak terdapat hubungan antara galat model dengan satu atau lebih variabel penjelas, dengan prosedurnya sebagai berikut:

H_0 : korelasi $(X_{it}, \varepsilon_{it}) = 0$ (efek *cross-section* tidak berhubungan dengan regresor lain).

H_1 : korelasi $(X_{it}, \varepsilon_{it}) \neq 0$ (efek *cross-section* berhubungan dengan regresor lain).

Penerimaan atau pun penolakan salah satu hipotesis tersebut didasarkan pada perbandingan nilai Wald test dan nilai X^2 , atau nilai prob yang dihasilkan oleh software E-views dengan ketentuan jika nilai $W > X^2_{(\alpha, K)}$ atau $\text{prob} < 0,05$, maka hipotesis awal H_0 diterima sehingga model yang terpilih adalah model efek tetap.

Selanjutnya, pengujian untuk menguji efek waktu, dan individu atau keduanya dengan mempergunakan uji Breusch-Pagan. Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : $c = 0, d = 0$ (tidak terdapat efek *cross section* maupun waktu)

H_0^c : $c = 0, d_t \sim iid, N(0, \sigma_d^2)$ atau tidak terdapat efek *cross section*

H_1^c : $c \neq 0, d_t \sim iid, N(0, \sigma_d^2)$ atau terdapat efek *cross section*

H_0^d : $c = 0, c_t \sim iid, N(0, \sigma_c^2)$ atau tidak

terdapat efek waktu

H_1^d : $c \neq 0, c_t \sim iid, N(0, \sigma_c^2)$ atau terdapat efek waktu

Statistik uji dalam pengujian Breusch-Pagan dengan taraf signifikansi 0,05 (5%), dan wilayah kritisnya, yaitu jika nilai $\text{prob} < 0,05$, maka hipotesis awal H_0 ditolak. Gujarati (2006) menyatakan bahwa pemilihan model antara REM (*Random Effect Model*) dan FEM (*Fixed Effect Model*) adalah dapat dilakukan dengan melihat kriteria, yaitu:

1. Jika $T > N$, maka model yang digunakan adalah FEM
2. Jika $T < N$, maka model yang digunakan adalah REM

Koefisien Determinasi

Menurut Green (2012) koefisien determinasi (*Goodness of Fit*) yang dinotasikan dengan R^2 , merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat memberikan informasi baik atau tidak baik model regresi yang terestimasi. Atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang terestimasi. Nilai R^2 (antara 0 dan 1) mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independen.

Variabel yang dioperasionalkan dalam penelitian ini terdiri dari kemiskinan (MIS), pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan dana zakat infaq dan sadaqah (ZIS). Kemiskinan (MIS) adalah penduduk miskin yang dalam kondisi tidak berkecukupan. Artinya konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS). Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Data diukur dengan persen yang bersumber dari BPS.

Selanjutnya PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota data bersumber oleh BPS Statistik Keuangan Daerah 2018, dan di ukur dalam satuan juta rupiah. Terakhir ZIS (Zakat Infaq dan Sadaqah) adalah total realisasi penerimaan ZIS di kabupaten kota tertentu selama periode waktu tertentu diukur dengan satuan juta rupiah.

Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini melihat pengaruh PAD, ZIS terhadap MIS di provinsi Aceh. Dengan rentang waktu tahun 2013 sampai dengan 2017, sehingga terdapatnya pengaruh PAD, ZIS terhadap MIS. Pada Tabel 1 menunjukkan hasil statistic deskriptif untuk seluruh variable yang digunakan dalam penelitian ini. Yang menjelaskan bahwa rata-rata Kemiskinan (MIS) sebesar 17.66 untuk periode 2013-2017. Nilai persentase tersebut mengindikasikan bahwa kemiskinan Provinsi Aceh sudah berada tingkat kemiskinan yang kecil.

Tabel 1. Deskriptif Variabel

	MIS	PAD	ZIS
Median	17.660	69.700	4.62E+09
Maximum	23.700	377.270	2.14E+10
Minimum	7.410	7.880	3.45E+08
Std. Dev.	3.811	66.947	4.99E+09
Obs	115	115	115

Sumber : Data Sekunder (Diolah), 2019.

Tabel 1 menggambarkan bahwa kemiskinan tertinggi sebesar 23.30 terdapat pada kabupaten Aceh Barat tahun 2013 dan yang terendah sebesar 7.41 terdapat pada kota Banda Aceh pada tahun 2016. Nilai standar deviasi kemiskinan sebesar 3.811255, artinya variabilitas kemiskinan selama periode observasi 3.811255 satuan. Selanjutnya dari Tabel 1 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) terendah pada kota Subulussalam tahun 2013 dengan nilai sebesar 7.88 persen dan tertinggi bernilai sebesar 377.27 milyar diperoleh oleh kabupaten Aceh Utara pada tahun 2016. Kemudian dana ZIS yang tertinggi adalah kabupaten Aceh Utara sebesar 2.14E+10 juta pada tahun 2015, dan dana ZIS terendah sebesar 3.45E+08 juta yang terdapat pada kabupaten Simeulue pada tahun 2015.

Berdasarkan uji Hausman didapat nilai Nilai prob 0,7107 lebih dari 0,05 maka tolak H_1 yang berarti metode terbaik yang harus digunakan adalah *random effect*. Demikian juga dengan dilakukan uji Lagrange Multiplier (dengan hasil *random effect*) seperti tertera pada Tabel. 2 dan 3.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.683	2	0.711

Sumber : Data Sekunder (Diolah), 2019.

Tabel 3. Hasil Uji Lagrange Multiple (LM)

Lagrange multiplier (LM) test for panel data			
Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	199.706	2.246	201.952
	(0.000)	(0.134)	(0.000)

Sumber : Data Sekunder (Diolah), 2019.

Setelah melakukan regresi dengan menggunakan *software Eviews 10*, dengan menggunakan model analisis *Random Effect Model*, maka didapatkan hasil pengujian signifikansi seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Regresi Panel Metode Random Effect

Dependen Variabel : Kemiskinan			
Variabel	Koefisien	Prob.	Signifikan
C	18.257	0,000	S
PAD	-0.005	0,036	S
ZIS	-6.14E-1	0,092	S
<i>R squared</i>		0,956	
<i>Prob(F-statistic)</i>		0,000	
Durbin-Watson Stat		1,148	

Sumber : Data Sekunder (Diolah), 2019.

Pada Tabel 4 diatas menunjukkan hasil regresi akhir atas model penelitian dengan menggunakan metode *random effect* di mana MIS menjadi variabel dependen dan variabel lainnya adalah variabel independen. Langkah pertama, dari uji F statistik terlihat bahwa nilai probabilitasnya adalah signifikan pada level 5% yang artinya seluruh variabel independen (PAD, ZIS) secara bersama-sama berpengaruh terhadap

variable dependen MIS. Langkah berikutnya, uji kecocokan model (*goodness of fit*) dilihat dari nilai *adjusted R-square* yang bernilai 95,59 %, yang artinya variasi dari MIS dapat dijelaskan oleh variabel dalam model (PAD, ZIS) sebesar 95.59 % sementara sisanya 4.41 % dijelaskan oleh faktor dan variabel lain di luar model dalam penelitian ini. Selanjutnya pada variabel independen PAD kabupaten/ kota provinsi Aceh ditemukan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yaitu selama periode 2013-2017, artinya bahwa selama observasi PAD dapat menurunkan kemiskinan pada kabupaten/ kota Provinsi Aceh.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Prami (2016) menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga diharapkan kepada pemerintah untuk mencapai target PAD yang lebih tinggi, dan diperlukan di dalam mengurangi kemiskinan. Namun ada penelitian yang berbeda dengan hasil penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Frans et.al (2017) menemukan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada setiap kota di provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015. Ini berarti bahwa dengan semakin tingginya pendapatan asli daerah dan PDRB perkapita belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, variabel independen Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) kabupaten/ kota provinsi Aceh ditemukan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan, yaitu selama periode 2013-2017, menunjukkan bahwa dana ZIS berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan kabupaten/ kota provinsi Aceh sebesar 6.14 poin. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bashir (2018) menguraikan bahwa di dalam pada program menurunkan kemiskinan berfokus pada mekanisme yang digunakan secara historis dan berhasil mengurangi ketidaksetaraan, baik mekanisme wajib (zakat) maupun sukarela (sadaqah) digunakan untuk memotivasi orang kaya untuk menghabiskan banyak dana untuk program pengurangan kemiskinan

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa variabel independen (PAD, ZIS) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (MIS).
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Sehingga dapat dimaknai bahwa Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan menurunkan kemiskinan di kabupaten/ kota provinsi Aceh.
3. Dana Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Sehingga dapat dimaknai bahwa zakat infaq dan sadaqah yang tinggi akan menurunkan kemiskinan di kabupaten/ kota provinsi Aceh

Implikasi dari temuan ini adalah kepada pemerintah daerah untuk lebih fokus pada peningkatan PAD dan peningkatan dana ZIS dalam rangka menurunkan kemiskinan di kabupaten/ kota di provinsi Aceh serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan percepatan pembangunan daerah

Daftar Pustaka

- Abiola A.G., & Mustapha, S. (2015). Impact Assessment of public budget indicator on the Nigerian poor. *Journal of Economics and Development Studies*, 3(3), 71-85.
- Agyemang, D. W. K. (2018). Reducing poverty through fiscal decentralization in Ghana and beyond: A review. *Cogent Economics & Finance* 6(1), 1-14.
- Al-Arif, M. R. (2012). Efek Multiplier Zakat terhadap Pendapatan di Provinsi DKI Jakarta. *Al-Iqtishad*, 4(1), 51-56.
- Amri, K. (2014). Infrastruktur Transportasi dan Kepadatan Penduduk Dampaknya Terhadap Pendapatan Per Kapita: Panel Data Evidence dari Sembilan Provinsi di Sumatera, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2 (2), 438-450

- Amri, K. (2017a). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 1(1), 1-11
- Amri, K. (2017b). Indek Harga Konsumen dan Belanja Modal Terhadap Indek Perilaku Korupsi, *SI-MEN (Akuntansi dan Manajemen)* 8(1), 49-65.
- Amri, K. (2018). The macroeconomic impact of regional minimum wages: A cross-province data evidence from Indonesia, *Regional Science Inquiry*, 10(3), 163-176.
- Amri, K., & Aimon, H. (2017). Pengaruh Pembentukan Modal Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Economac* 1(1), 1-16.
- Amri, K., & Nazamuddin. (2018a). Is there causality relationship between economic growth and income inequality? Panel data evidence from Indonesia, *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 6(2), 8-20.
- Amri, K., & Nazamuddin. (2018b). Is There Causality Relationship between Export and Employment: A Time Series Data Evidence from Indonesia. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 7(2), 86–99.
- Amri, K., Nazamuddin., Masbar, R., & Aimon, H. (2019). Is there a causality relationship between local tax revenue and regional economic growth? A panel data evidence from Indonesia, *Regional Science Inquiry* 11 (1), 73-84.
- Amri, K., & Marwiyati. (2019). Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh, *Jurnal Manajemen dan Sains*, 4(2), 386-391.
- Ayuniyyah, Q. A. H. (2018). Zakat For Poverty Alleviation and Income Inequity Reduction: west Java Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 85-100.
- Badan Pusat Statistik, (2018). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh .
- Banda Pusat Statistik, (2018). Aceh Dalam Angka.
- Bashir, A. H. (2018). Reducing Poverty and Income Inequities: Current Approaches and Islamic Perspective. *Journal King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 31(1), 23-41.
- Beik, I. &. (2015). Contruction Of CIBEST Model As Measurement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic Persfective. *Al-Iqtishad: Journal Of Islamic Economics*, 87-104.
- Darise, N. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Frans, D. S. R. (2017). The Influence of local Government Revenue, Per capita income, Education Level on Level Poverty (Empiric Study On City In West Java During. *e-Proceeding of Management*, 4(2), 23-35.
- Green, W. (2012). *Econometric Analysis*. Seventh Edition. New York: Pearson Education, Inc.
- Gujarati, D. (2006). *Ekonometrika*, Jakarta (ID): Erlangga.
- Jaka, S. (2018). Reducing Regional Poverty Rate in Central Java. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 11(1), 121-135.
- Maharajabdinul, R. A. (2015). Contribution Of Fiscal Decentralization To Poverty Reduction In Eastern Indonesia. *Journal of Business and Management*, 17(12), 53-60.

- Maryati, U. D. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 21-37.
- Miranti, R. E., Vidyattama, H. C., & Duncan, 2013 (2013). Trend in Poverty and Inequality in Decentralising Indonesia In OECD Social, Employment and Migration Working Papers. OECD Publishing, 1-115.
- Muliadi., & Amri, K. (2019). Infrastruktur Jalan, Belanja Modal dan Kesempatan Kerja: Bukti Data Panel Kabupaten Kota di Aceh, *Jurnal Manajemen dan Sains*, 4(2), 334-341.
- Nursini, A. S. (2018). Implementing Pro Poor Budgeting in Poverty Reduction: A Cases of Lokal Government in Bone District, South Sulawesi Province, Indonesia. *International Journl of Economics and Financeal Issues* 8(1), 30-38.
- Panji, I. P. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskina di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud* 5(3), 316-337.
- Saraswati, S. A., & Prami, I. G. A. A. (2016). Pengaruh pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud* 5(4), 1292-1316.
- Sejahtera, P. (2016). Decentralization and Poverty in Indonesia: The Cast of karo District. *Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 8-15.
- UU, R. I. Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- World Bank, (2010). Building Institutions for Market. *World Development Report 2010 (Overview)*.